

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Sulistio Dinar Putra¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Yamardi³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan desa tangguh bencana di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat belum optimal, pada dimensi komunikasi penyampaian informasi penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa Cikahuripan yang kurang maksimal, masih kurangnya pada dimensi sumber daya yaitu sumber daya manusia yang kurang jumlah, serta sumber daya anggaran yang terbatas sehingga kurang terpenuhinya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana. Disposisi atau kemampuan para pelaksana dalam menyikapi masalah sudah responsif. Struktur birokrasi menerapkan Standar Operasional Prosedur pada pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Tangguh Bencana, Bencana

Abstract

This study was conducted to describe the implementation of the disaster resilient village policy in Cikahuripan Village, Lembang District, West Bandung Regency. The method used in this study is a descriptive analysis method with a qualitative approach. The theory used in this study is the theory of George Edward III which explains that policy implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The data collection techniques used are literature studies, observations, interviews, and documentation. The results of this study show that the Implementation of the Disaster Resilient Village Policy in Cikahuripan Village, Lembang District, West Bandung Regency has not been optimal, in the dimension of communication of information delivery by the Cikahuripan Village Government which is not

optimal, there is still a lack in the dimension of resources, namely human resources that are not in number, and limited budget resources so that the resources of facilities and infrastructure are not fulfilled. The disposition or ability of the implementers in responding to problems has been responsive. The bureaucratic structure applies Standard Operating Procedures to the implementation of activities.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Resilient Villages, Disasters

PENDAHULUAN

Wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat rentan akan terjadinya bencana yang memiliki karakteristik geografisnya yang khas, termasuk kemiringan lahan yang signifikan. Selain itu, Desa Cikahuripan tepat berada di jalur lintasan patahan lembang atau sesar lembang yang menjadi ancaman bencana paling serius yang berpotensi menyebabkan gempa bumi dengan kekuatan sekitar 6,8 hingga 7 skala magnitudo. Oleh karena itu, Desa Cikahuripan menjadi titik fokus dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengimplementasikan kebijakan Desa Tangguh Bencana (DesTaNa), yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap masyarakat dan aset-aset vital dari ancaman bencana, serta untuk memperkuat ketahanan komunitas terhadap dampak bencana yang mungkin terjadi. Dengan adanya Desa Tangguh Bencana, diharapkan masyarakat khususnya tingkat desa atau kelurahan dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan bencana dengan cara yang lebih terorganisir, efektif, dan berkelanjutan.

Desa tangguh bencana di Desa Cikahuripan dibentuk pada tahun 2015 atas instruksi langsung yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana setelah terjadinya bencana besar yaitu tanah longsor pada tahun 2015 Di Desa Cikahuripan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Nomor: 144/SK.39-Kesra/2015. Namun, dalam implementasinya

masih memiliki beberapa masalah, yaitu Sosialisasi atau pengarahan kepada masyarakat kurang maksimal dan Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta fasilitas penunjang kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini menggabungkan konsep teori implementasi kebijakan dengan *variable* dan dimensi dengan menggunakan teori George Edward III. Widodo (2022: 96-110) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model kebijakan yang dapat dipergunakan untuk mencapai kesempurnaan kebijakan yang dilakukan. Berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, (1) Komunikasi, proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*). (2) Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. (3) Disposisi, kemauan keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. (4) Struktur birokrasi, mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nasution (2023: 34) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menjadi salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi,

menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas serta keunggulan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan maupun digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif terletak pada data, penggunaan teori serta hasil dari teori.

Morissan (2017: 166) menjelaskan bahwa Unit analisis merupakan keseluruhan hal yang akan diteliti guna mendapat kejelasan mengenai unit yang dianalisis atau disebut sebagai observasi. Penelitian ini dalam menentukan unit analisis yakni Pemerintah Desa Cikahuripan.

Dalam konteks penelitian, subjek penelitian atau informan merujuk kepada individu atau entitas yang menjadi sumber informasi terkait dengan gejala, variabel, atau masalah yang sedang diselidiki. Silalahi (2010: 250) menjelaskan bahwa subjek penelitian akan dianggap sebagai orang dengan pengetahuan yang paling mendalam guna sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberi informasi yang bersifat relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam menentukan informan dengan pihak yang memiliki pemahaman mengenai Desa Tangguh Bencana (Destana) agar mendapatkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. (1) Kepala Desa Cikahuripan, (2) Sekretaris Desa Cikahuripan, (3) Ketua Desa Tangguh Bencana Desa Cikahuripan, (4) Fasilitator Desa Tangguh Bencana BPBD Kabupaten Bandung Barat, (5) Seksi pencegahan dan mitigasi Destana Cikahuripan, (6) Seksi logistik dan peralatan Destana Cikahuripan, (7) Lembaga Masyarakat Desa Cikahuripan dan (8) Tokoh masyarakat Desa Cikahuripan. Informan di sini merupakan informan yang secara langsung maupun tidak langsung mengetahui ataupun terlibat dalam pengelolaan serta pengimplementasian Destana di Desa Cikahuripan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni ada tiga, diantaranya (1) Studi Kepustakaan. Moleong (2018: 23) menjelaskan bahwa studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan serta penyusunan data atau sumber pendukung

yang diperoleh dari buku, media internet, dokumen hingga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. (2) Observasi. Observasi merupakan langkah pertama dalam proses pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pemantauan secara tidak langsung turun ke lapangan, tujuannya adalah guna mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya. (3) Wawancara. Sugiyono (2017: 231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna mengetahui hal mendalam dari narasumber. (4) Dokumentasi.

Rijali (2018: 84) analisis data merupakan upaya guna mencari serta menata secara sistematis dari catatan hasil observasi yang dilakukan, wawancara, guna meningkatkan pemahaman mengenai hal yang diteliti yang disajikan sebagai hasil temuan dengan meningkatkan pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna.

Miles dan Huberman (1994: 12) proses analisis data penelitian terbagi ke dalam empat, diantaranya (1) Reduksi Data. Hardani, *et al.* (2020:164) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan proses pemeliharaan, pemusatan perhatian sederhana, abstrak dan transformasi data akan muncul melalui catatan-catatan lapangan. (2) Penyajian data. Sahir (2021: 48) menjelaskan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. (3) Penarikan Kesimpulan. Hardani, *et al.* (2020: 171) menjelaskan bahwa simpulan yang dibuat haruslah relevan dengan fokus penelitian, hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Peran dari

pelaksana kebijakan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya kebijakan tersebut, karena pada dasarnya peran pelaksana inilah yang menjadi indikator dari keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan tersebut.

Komunikasi. Komunikasi dalam kebijakan memuat beberapa dimensi yaitu: transformasi informasi, dan konsistensi informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, terkait komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cikahuripan baik dalam hal transmisi informasi serta konsistensi dalam penyampaian sebuah informasi terkait kebencanaan selalu mengalami perkembangan. Saat ini Pemerintah Desa Cikahuripan semakin memperluas serta terus memaksimalkan penyebaran informasi terkait kebencanaan melalui grup sosial media *whatsapp* dengan harapan informasi yang diberikan dapat tersampaikan kepada semua pihak yang ditujukan dalam kurung waktu singkat dan cepat serta melakukan sosialisasi secara berkala yang berpusat di kantor Desa Cikahuripan. Dari hasil wawancara serta observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, timbul hambatan yang terjadi dengan sikap pemerintah yang saat ini mengedepankan perkembangan penyebaran informasi melalui grup media sosial *whatsapp* dan sosialisasi secara berkala di kantor desa cikahuripan, yakni masih ada dan banyak dari masyarakat Desa Cikahuripan khususnya lansia gagap teknologi dan masih tidak mau dalam mengembangkan pengetahuannya sehingga informasi-informasi yang disampaikan pemerintah Desa Cikahuripan di grup media sosial *whatsapp* tidak tersampaikan dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang acuh terhadap sosialisasi tentang kebencanaan yang ada dan di selenggarakan di desa karena menurut sebagian masyarakat kurang menarik. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pihak lembaga masyarakat desa (Rukun Warga) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat serta masyarakat

menyatakan bahwa pemerintah sudah cukup konsisten dalam memberikan setiap informasi serta memberikan arahan terkait kegiatan- kegiatan kebencanaan di Desa Cikahuripan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti secara langsung, Pemerintah Desa Cikahuripan melalui organisasi Desa Tangguh Bencana dalam melakukan sosialisasi terkait kebencanaan dalam pengurangan risiko bencana dilakukan setiap tahun, yaitu di awal tahun, pertengahan tahun, dan penghujung tahun, baik secara langsung maupun online. Dalam kasus yang sama terkadang pemerintah desa memberikan informasi secara berkala kepada lembaga pemerintahan desa dan masyarakat pada musim penghujan dan musim kemarau. Serta sosialisasi antara Pemerintah Desa Cikahuripan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat satu kali atau dua kali dalam satu tahun dilakukan pada saat awal tahun untuk mengutarakan setiap rencana kegiatan dan di akhir tahun untuk mengevaluasi kegiatan.

Sumber Daya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan serta merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan ketenagakerjaan khususnya perluasan kesempatan kerja. Proses pelaksanaan kebijakan harus cermat dan terarah karena keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya kebijakan desa tangguh bencana diperlukan sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Cikahuripan sudah tanggap saat terjadinya bencana karena karakter warga desa Cikahuripan yang memiliki sikap gotong royong yang masih tinggi, namun belum tanggap dalam proses pra bencana seperti kegiatan sosialisasi diadakan pemerintah desa. Sumber daya anggaran dan fasilitas yang dimiliki oleh Desa Cikahuripan dalam mendukung

pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Cikahuripan saat ini Pemerintah Desa Cikahuripan dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan kebencanaan selalu mengusahakan sebaik mungkin dan memaksimalkan setiap anggaran yang tersedia. Hal tersebut karena pihak pemerintah menyatakan bahwa anggaran yang didapatkan oleh Desa Cikahuripan masih belum mampu untuk menyediakan setiap peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan setiap kegiatan khususnya terkait kegiatan pelatihan.

Disposisi. Pemerintah Desa Cikahuripan sebagai pelaksana dari kebijakan terkait desa tangguh bencana di Desa Cikahuripan sudah mengupayakan untuk selalu menjalankan setiap kegiatan dari kegiatan- kegiatan semaksimal mungkin dengan mengupayakan berbagai cara untuk menghadapi setiap hambatan yang terjadi. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pelaku pelaksana di Desa Cikahuripan khususnya organisasi desa tangguh bencana baik dari segi pengetahuan serta pengalaman, dapat dilihat dari setiap program-program atau kegiatan-kegiatan kebencanaan di Desa Cikahuripan. Pihak-pihak lainnya seperti lembaga pemerintah desa berpendapat hal yang sama bahwa kesiapan dan keinginan dari Pemerintah Desa Cikahuripan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya khususnya anggota desa tangguh bencana dan relawan-relawan dari masyarakat Desa Cikahuripan memang sudah baik. Ditandai dengan banyaknya program pelatihan kerja untuk anggota desa tangguh bencana dan relawan masyarakat Desa Cikahuripan saat ini dengan perkembangan berbagai lembaga pelatihan kerja diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas anggota desa tangguh bencana dan relawan masyarakat Desa Cikahuripan serta memperbesar dan memperluas pengetahuan ketangguhan bagi anggota desa tangguh bencana dan relawan masyarakat Desa Cikahuripan.

Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek

seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit unit organisasi dan sebagainya. Kebijakan desa tangguh bencana dapat dilaksanakan apabila ada kewenangan yang diberikan kepada pelaksana, oleh karena itu perlunya struktur birokrasi yang rinci pada organisasi khususnya di pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, desa cikahuripan khususnya organisasi desa tangguh bencana cikahuripan dalam setiap melaksanakan program kerja selalu memulai perencanaan terlebih dahulu dengan merancang kegiatan beserta anggaran sehingga dijadikan sebagai acuan kerja yang di dalamnya terdapat SOP untuk melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan. Hal tersebut didukung dengan beberapa pernyataan dari pihak pemerintah Desa Cikahuripan. Kegiatan yang dijalankan terkait program-program pelatihan atau program sosialisasi kebencanaan selalu memiliki tujuan yang tegas dan jelas dengan para pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan program-program tersebut.

Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa memberikan pemahaman-pemahaman mengenai faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah Desa Cikahuripan. Adapun berbagai hambatan dalam implementasi suatu kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Cikahuripan ini diantaranya (1) Sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat kurang maksimal. Hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan desa tangguh bencana di desa cikahuripan didasari oleh minimnya pengetahuan akan teknologi yang mempengaruhi terhadap informasi-informasi yang diberikan tidak tersampaikan dengan maksimal. (2) Keterbatasan anggaran dan fasilitas. Pemerintah Desa Cikahuripan mengakui bahwa keterbatasan anggaran yang menjadikan kurangnya fasilitas yang

dimiliki untuk menunjang program- program terkait kebencanaan di Desa Cikahuripan. Keterbatasan anggaran dari Dana Desa Cikahuripan menjadi penghambat dalam mengembangkan fasilitas yang menunjang program-program pelatihan, seperti peralatan evakuasi. Sehingga pemerintah Desa Cikahuripan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi setiap kebutuhan program-program kebencanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Desa Tangguh Bencana di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa: (1) Komunikasi: Implementasi kebijakan menunjukkan adanya kekurangan dalam penyebaran informasi. Masih terdapat masyarakat yang kurang terlibat dan kurang memahami teknologi, terutama kelompok lansia. Meskipun demikian, konsistensi komunikasi antara Pemerintah Desa Cikahuripan dan pihak terkait sudah baik. (2) Sumber Daya: Dimensi sumber daya menunjukkan beberapa hambatan, khususnya dalam hal peralatan kebencanaan yang belum memadai akibat keterbatasan anggaran. Namun, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia cukup baik, dengan pengurus dan anggota relawan yang memadai dan memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas meeka.

(3) Disposisi: Karakteristik pelaksana kebijakan sudah baik, terbukti dari pelaksanaan program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cikahuripan dan difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat. Kompetensi pelaksana kebijakan cukup mendukung keberhasilan program.

(4) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi menunjukkan adanya aturan dan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan kebencanaan, yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 84.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication, Inc.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

